



LAPORAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN TAHUN 2024



KPU KABUPATEN MAJALENGKA

Jl. Gerakan Koperasi No.18, Majalengka Wetan,
Kec. Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa
Barat 45411

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Tahapan dan Non-Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal, guna memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan efektif, transparan, dan akuntabel.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dari hasil diskusi dan kajian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KPU Kabupaten Majalengka, Bawaslu, instansi/lembaga terkait, media massa, akademisi, partai politik, serta pemantau dan pemerhati pemilu. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan serta rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem pemilihan di masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan narasumber yang telah berkontribusi dalam diskusi ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Majalengka.

Majalengka, 26 Februari 2025

Sekretaris,



Mohamad Hasan Sukur

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Sasaran Kegiatan.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	1
BAB 2: GAMBARAN UMUM	2
2.1 Dasar Pelaksanaan Kegiatan.....	2
2.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan	2
2.3 Susunan Pelaksanaan Kegiatan	2
BAB 3 : Hasil Kegiatan	6
3.1 FGD Sesi 1: Evaluasi Tahapan Pemilihan	6
3.2 FGD Sesi 2: Evaluasi Non-Tahapan Pemilihan	6
3.3 FGD Sesi 3: Evaluasi Kelembagaan (Supporting System)	6
3.4 FGD Sesi 4: Evaluasi Faktor Eksternalitas.....	6
3.5 FGD Sesi 5 : Review dan validasi data isian kuesioner.....	7
Kesimpulan dan Rekomendasi	8
Lampiran	I

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu wujud demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung. Evaluasi terhadap tahapan pemilihan menjadi hal yang krusial untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Kabupaten Majalengka sebagai salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada 2024 perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tahapan pemilihan yang telah berlangsung.

Forum Group Discussion (FGD) ini diselenggarakan sebagai upaya refleksi dan analisis atas penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, mengevaluasi efektivitas tahapan, serta memberikan rekomendasi strategis guna perbaikan dalam pelaksanaan pemilihan di masa mendatang.

1.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini meliputi:

1. KPU Kabupaten Majalengka sebagai penyelenggara utama pemilihan;
2. Instansi/lembaga terkait yang turut berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu;
3. Media massa sebagai pihak yang berperan dalam penyebarluasan informasi pemilu;
4. Akademisi sebagai pihak yang dapat memberikan analisis dan kajian akademis terhadap pelaksanaan pemilu;
5. Partai politik yang menjadi peserta pemilu serta berperan dalam pendidikan politik masyarakat;
6. Pemantau dan pemerhati pemilu yang berkontribusi dalam mengawal proses demokrasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi secara komprehensif tahapan serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Majalengka.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama tahapan pemilihan;
2. Mengevaluasi efektivitas kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam Pilkada 2024;
3. Merumuskan rekomendasi perbaikan bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang;
4. Meningkatkan kualitas demokrasi lokal dengan memperbaiki sistem pemilihan dan partisipasi masyarakat.

BAB 2: GAMBARAN UMUM

2.1 Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Dasar pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada berbagai regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
5. Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor 314/PL.01-SD/01/2025.

2.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan FGD dilaksanakan selama dua hari dengan jadwal sebagai berikut:

- **Hari Pertama:**
 - Deni Herdiana, S.I.P., M.Si materi Evaluasi Tahapan Pemilihan;
 - H. Nasihin materi Evaluasi Non-Tahapan Pemilihan;
 - Dr. H. Diding Bajuri, M.Si. materi Evaluasi Kelembagaan (Supporting System);
 - Agus Syuhada, M.H.I materi Evaluasi Faktor Eksternalitas.
- **Hari Kedua:**
 - Hj. Elih Solehah Fatimah materi Review dan validasi data isian kuesioner oleh Anggota dan Sekretariat KPU Majalengka.

2.3 Susunan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dengan susunan pelaksanaan sebagai berikut:

1. **Penyelenggara :** KPU Kabupaten Majalengka, 5 orang unsur komisioner dan 26 unsur sekretariat.

KOMISIONER	
1	TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA, M.Pd
2	HJ. ELIH SOLEHAH FATIMAH, S. Pd
3	H. DEDEN SYARIPUDIN, S.Pd., MM
4	NIA NAZMIATUN, S.Pd
5	ANDHI INSAN SIDIEQ, S.Pt

Penanggung Jawab

: Mohamad Hasan Sukur, S.Sos (Sekretaris)

Ketua Pelaksana

: Budi Cahyana, S.Kom (Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi)

Seksi Acara		
1	Budi Cahyana, S.Kom	Notulensi FGD 5
2	Niknik Ratna Suminar, S.H.	Notulensi FGD 2
3	Supriati Puji Astuti, S.E.	Notulensi FGD 3
4	Efar Januar Udnur, S.I.P	Notulensi FGD 4
5	Mario Jordan	Notulensi FGD 1
6	Iin Indrawati, S.Ipol	Pembawa Acara
7	Nurul Iman	Pembaca Doa
8	Aep Saepudin	Registrasi
9	Tria Agustina, A.Md.Ak	Registrasi
10	Lani Lidiawaty, A.Md	Registrasi
11	Ipan Nursalam, S.Kom	Operator
Seksi Konsumsi		
12	Nadine Nadia Natalia Sitanggang, S.H.	
13	Wawan Gunawan	
14	Didi Taudi	
15	Yedi Arif Riyadi	
Seksi Perlengkapan		
16	Iwan Riswandi	
17	Hasanudin, S.Kom	
18	Ridwan Setiawan	
Seksi Dokumentasi		
19	Hendi Irawan, A.Md.	
20	Asep Sunjati	
21	Nunu Nugraha, S.Farm.	
Seksi Keamanan		
22	Ade Farhan Nizami, S.A.P.	
23	Iman Sukiman	
24	Fajar Iskandar	
25	Ade Soleh	

2. **Peserta** : 92 Orang terdiri dari :

INSTANSI/LEMBAGA		Jumlah Undangan
1	Kodim 0617 Majalengka	2 Orang
2	Polres Majalengka	2 Orang
3	Bawaslu Kabupaten Majalengka	2 Orang
4	DESK PILKADA	2 Orang
5	Kesbangpol Kabupaten Majalengka	2 Orang
6	Disdukcapil Kabupaten Majalengka	2 Orang
7	Kejaksaan Negeri Majalengka	2 Orang

8	Pengadilan Negeri Majalengka	2 Orang
9	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majalengka	2 Orang
10	BKAD Kabupaten Majalengka	2 Orang
11	Diskominfo Majalengka	2 Orang
12	Bappedalitbang Kabupaten Majalengka	2 Orang
13	KCD Wilayah IX	2 Orang
MEDIA MASSA		
1	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Majalengka	2 Orang
2	Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) Majalengka	2 Orang
3	Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Majalengka	2 Orang
4	Forum Pers Independen Indonesia (FPPI) Majalengka	2 Orang
5	Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Majalengka	2 Orang
6	Jaringan Jurnalis Majalengka (JAJAKA)	2 Orang
7	Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Majalengka	2 Orang
8	Forum Pergerakan Jurnalis (FPJ) Majalengka	2 Orang
9	Pokja Polres Majalengka	2 Orang
10	Radika FM	1 Orang
11	Radio Elshinta	1 Orang
12	BESOKSENIN.CO	1 Orang
13	Info MJLK	1 Orang
14	Media Galura	1 Orang
15	FMM	1 Orang
16	METRO TV	1 Orang
17	NUSANTARA TV	1 Orang
AKADEMISI		
1	UNIVERSITAS MAJALENGKA	2 Orang
2	UNIVERSITAS YPIB	2 Orang
3	SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) PUI	2 Orang
4	INSTITUT BUDI UTOMO NASIONAL (INSTBUNAS)	2 Orang
5	UNIVERSITAS SINDANGKASIH	2 Orang
6	UNIVERSITAS LP3I JATIWANGI	2 Orang
7	POLITEKNIK MARDIRA INDONESIA	2 Orang
PARPOL		
1	DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1 Orang
2	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1 Orang
3	DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	1 Orang
4	DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR)	1 Orang
5	DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem)	1 Orang

6	Exco Partai Buruh	1 Orang
7	DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	1 Orang
8	DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1 Orang
9	Pimcab Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1 Orang
10	DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1 Orang
11	DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	1 Orang
12	DPD Partai Amanat Nasional (PAN)	1 Orang
13	DPC Partai Bulan Bintang (PBB)	1 Orang
14	DPC Partai Demokrat	1 Orang
15	DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1 Orang
16	DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1 Orang
17	DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1 Orang
18	DPD Partai UMMAT	1 Orang
TIM PEMENANGAN		
1	Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Dr. H. karna Sobahi, M.M.Pd. dan Koko Suyoko	2 Orang
2	Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Eman Suherman, M.M dan Dena Muhamad Ramdhan	2 Orang
PEMANTAU PEMILU		
1	LKD PMII	2 Orang
PEMERHATI PILKADA		
1	DEEP	2 Orang

3. **Fasilitator** : 4 orang terdiri dari:
1. Deni Herdiana, S.I.P., M.Si;
 2. H. Nasihin;
 3. Dr. H. Diding Bajuri, M.Si.;
 4. Agus Syuhada, M.H.I.

BAB 3 : Hasil Kegiatan

3.1 FGD Sesi 1: Evaluasi Tahapan Pemilihan

Fasilitator Deni Herdiana, S.I.P., M.Si

Temuan dan Rekomendasi:

- Tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pasca pemilihan perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih efektif.
- Dibutuhkan peningkatan akurasi data pemilih guna menghindari permasalahan teknis di kemudian hari.
- Penggunaan aplikasi SIREKAP masih memiliki kendala yang perlu diperbaiki sebelum pemilu berikutnya.

3.2 FGD Sesi 2: Evaluasi Non-Tahapan Pemilihan

Fasilitator 2 H. Nasihin.

Temuan dan Rekomendasi:

- KPU harus memastikan netralitas dan transparansi dalam proses rekrutmen badan ad hoc.
- Tingkat partisipasi pemilih yang menurun di beberapa wilayah menjadi perhatian utama.
- Perlu peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat agar dapat memilih secara rasional.

3.3 FGD Sesi 3: Evaluasi Kelembagaan (Supporting System)

Fasilitator Dr. H. Diding Bajuri, M.Si.

Temuan dan Rekomendasi:

- Unsur kelompok disabilitas dan marginal perlu mendapatkan porsi perhatian dalam pemilu.
- Media massa memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi pemilu yang objektif.
- KPU harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk mendukung kelancaran tahapan pemilu.

3.4 FGD Sesi 4: Evaluasi Faktor Eksternalitas

Fasilitator Agus Syuhada M.H.I.

Temuan dan Rekomendasi:

- Netralitas birokrasi harus ditegakkan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam pemilu.

- Politik transaksional dan nepotisme masih menjadi tantangan dalam sistem demokrasi yang harus diminimalisir.
- Partai politik diharapkan lebih aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

3.5 FGD Sesi 5 : Review dan validasi data isian kuesioner

Fasilitator Hj. Elih Solehah Fatimah, S.Pd.

Temuan dan Rekomendasi:

- Proses pengisian dan validasi kuesioner perlu lebih sistematis agar hasil evaluasi lebih akurat.
- Data yang diperoleh harus dianalisis secara mendalam untuk memastikan rekomendasi yang diberikan relevan.
- KPU Kabupaten Majalengka perlu menyusun laporan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner untuk perbaikan ke depan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Perlu perbaikan dan optimalisasi pada setiap tahapan pemilu guna meningkatkan efisiensi dan akurasi data.
2. Regulasi terkait pemilu harus lebih stabil agar tidak membingungkan penyelenggara dan peserta pemilu.
3. Partai politik harus lebih proaktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
4. Penggunaan teknologi dalam pemilu harus lebih dipersiapkan agar tidak membebani penyelenggara dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
5. KPU diharapkan terus menjaga independensi dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu.

Lampiran

1. Dokumentasi kegiatan





2. Notulensi

NOTULENSI FGD PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

JUM'AT, 21 FEBRUARI 2025 – SABTU, 22 FEBRUARI 2025

SESI 1 dan 2

FASILITATOR 1: DENI HERDIANA, S.IP., M.Si

FASILITATOR 2 : H. NASIHIN

PENGANTAR DARI FASILITATOR

- A. Terdapat 3 tahapan Pemilihan Kepala Daerah: Tahapan Persiapan, Tahapan Pelaksanaan, dan Tahapan Pasca Pemilihan;
- B. Berkaca dari kasus di Kabupaten Tasikmalaya, bahwa dibutuhkan kecermatan bagi penyelenggara agar terhindar dari permasalahan yang dapat terjadi di kemudian hari;
- C. Evaluasi pelaksanaan Pemilihan harus bersifat menyeluruh, bukan hanya terkait tahapan pemilihan tetapi juga mencakup keberlanjutan demokrasi lokal;
- D. Tingkat partisipasi yang mengalami penurunan di beberapa wilayah;
- E. Praktik politik transaksional;
- F. Regulasi terkait Pemilu dan Pemilihan yang mudah berubah;
- G. Akurasi data pemilih yang kerap kali menimbulkan permasalahan;
- H. Fenomena calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah;
- I. Fenomena pembatalan calon terpilih karena permasalahan syarat administrasi calon;
- J. Akurasi data aplikasi SIREKAP yang masih diragukan;

EVALUASI DARI PESERTA KEGIATAN

- A. Seleksi Anggota Badan *Ad Hoc* harus dilaksanakan secara objektif dan tidak berdasarkan latar belakang organisasi tertentu;
- B. Potensi-potensi kesalahan dan permasalahan dalam pemungutan suara harus dapat diantisipasi;
- C. Pemilihan serentak menimbulkan banyak permasalahan, sehingga ada baiknya dikembalikan lagi menggunakan sistem “dipilih oleh legislatif”;
- D. Dibutuhkan “Bank Data” bagi penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan akurasi data dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- E. Dalam proses rekrutmen Badan *Ad Hoc*, Komisi Pemilihan Umum harus mengedepankan independensi, netralitas, dan berbasis kompetensi;
- F. KPU harus memberikan pelayanan secara adil untuk semua Partai Politik tanpa membedakan;
- G. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di kabupaten Majalengka telah berjalan dengan baik dan sesuai regulasi, dibuktikan dengan tidak adanya permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi;
- H. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah sangat berhimpitan dengan tahapan Pemilu, sehingga berdampak pada beban kinerja penyelenggara yang cukup berat;

- I. Jeda waktu antara tanggal penetapan Daftar Pemilih Tetap dengan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara yang cukup jauh, sehingga berdampak pada tingkat partisipasi pemilih karena, dalam jeda waktu tersebut terdapat perubahan kondisi yang semula berstatus memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat;
- J. Pemanfaatan aplikasi atau teknologi dalam tahapan Pemilu dan Pilkada harus dipersiapkan lebih matang, sehingga tidak membebani beban kerja penyelenggara;
- K. Sosialisasi dan Pendidikan pemilih diharapkan dapat menjangkau seluruh segmentasi pemilih, khususnya segmen pemilih pemula. Akan tetapi hal tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan ketersediaan anggaran;
- L. Pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Majalengka memberikan ruang yang leluasa bagi jurnalis/wartawan untuk meliput kegiatan dan agenda KPU;

SESI 3 DAN 4

Pemaparan Pemateri 3 oleh Dr. H. Diding Bajuri

Pemateri melakukan pemaparan Evaluasi Kelembagaan (*Supporting System*) yang Secara Garis besar materinya terdapat pada file Powerpoint, dibawah ini beberapa catatan yang dikemukakan terkait hal tersebut :

1. Unsur-unsur Lapan dan Disabilitas dalam rangka kesuksesan sebuah pemilihan perlu mendapat porsi perhatian karena dapat mengakibatkan ketidakstabilan demokrasi.
2. Kesuksesan Penyelenggaraan Pemilu sangat tergantung dari peranan Stakeholder yang saling berkaitan, contohnya peranan Teman-teman Media sangat berperan dalam mempengaruhi pemilih melalui diseminasi Informasi;
3. Pendidikan Politik/Pemilih tidak bisa diserahkan sepenuhnya oleh KPU melainkan menjadi bagian tugas yang harus diemban oleh Partai Politik;
4. KPU dalam melaksanakan kegiatan Tahapan sangat memerlukan peran strategis Stakeholder.

II. Pemaparan Pemateri 4 oleh Agus Syuhada, M.H.I

Pemateri melakukan pemaparan Evaluasi Faktor Eksternalitas yang secara garis Besar materinya terdapat pada file Powerpoint, dibawah ini beberapa catatan yang dikemukakan terkait hal tersebut :

1. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kualitas Pilkada diantaranya :
 - a. Netralitas Birokrasi yang sering dilaksanakan untuk memobilisasi masyarakat, teknisnya dengan cara menjanjikan program ke depan atau justru menghambat suatu program yang ada di masyarakat.
 - b. Transaksi Jabatan/Karir jika Calon terpilih yang akan berpengaruh pada Kinerja ASN
 - c. Memudarnya Merit System karena karir didasarkan pada kedekatan dengan calon terpilih
 - d. Loyalitas menjadi penentu karir ASN selama satu periode kepemimpinan calon terpilih

Pemaparan Pemateri 3 oleh Dr. H. Diding Bajuri

Prinsip yang menjadi pegangan dalam rangka evaluasi, Menurut ISO/IEC 22301 Klausul 8.6.

:

1. Mengukur Kesesuaian dan keefektifan, Hal ini mencakup evaluasi analisis dampak usaha, penilaian risiko, strategi, solusi, serta rencana dan prosedur yang sudah ada.
2. Menggunakan berbagai metode evaluasi, Organisasi harus menggunakan beragam metode seperti penelaahan, analisis, latihan, pengujian, laporan pasca insiden dan evaluasi kinerja untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif;
3. Memastikan Mitra dan pemasok terpercaya, Evaluasi juga mencakup kemampuan kelangsungan usaha dari mitra dan pemasok yang terkait. Ini penting untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasokan dapat diandalkan.
4. Memeriksa Kepatuhan, Organisasi perlu memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan hukum dan peraturan, serta praktek terbaik industri. Ini juga membantu untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan dan tujuan
5. Melakukan Pembaharuan secara berkala, Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi harus memperbarui pendokumentasian dan prosedur mereka secara berkala untuk memastikan bahwa mereka selalu relevan dan efektif.

IV. Pemaparan Pemateri 4 oleh Dr. H. Diding Bajuri

1. Sanksi netralitas berupa pelanggaran disiplin hukuman disiplin sedang, berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan; dan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK namun dalam prakteknya Sanksi yang diberikan kepada ASN, TNI/POLRI tidak sebanding dengan promosi jabatan yang akan didapat
2. Data menunjukkan, dari 417 pelanggaran yang masuk KASN, tidak ada sanksi signifikan yang dijatuhkan

SESI DISKUSI

1. Pertanyaan dari Peserta Partai Politik
Pemilu hanyalah sebuah pesta *money* politik, pemilu juga menjadi sarana perpecahan sehingga pertanyaannya bagaimanakah formulasi pemilu yang baik dan benar agar tidak menimbulkan ekses negatif.

Tanggapan :

H. Diding : Sangat sulit menjawab hal tersebut karena analoginya seperti kita melihat implementasi reformasi apakah secara waktu sudah tepat atau belum

Agus Syuhada : Demokrasi yang ideal seperti apa, bahkan negara seperti Amerika, Australia belum tentu sempurna bebas dari politik uang namun kita harus optimis untuk membangun demokrasi yang ideal

2. Bagaimanakah wujud Demokrasi yang ideal? Karena misal nepotisme mungkin bisa cocok di suatu negara tapi tidak cocok di negeri kita sehingga demokrasi ideal itu bersifat relatif
Tanggapan :

H. Diding : Demokrasi itu bersifat adaptif, karena politik di Indonesia memiliki ciri khas yang belum tentu cocok di negara lain. Pada dasarnya politik itu masuk ke dalam ilmu sosial yang unsur yang dapat dipastikan adalah ketidakpastianya itu sendiri.

3. Partai Politik

1. Partai Politik mandul dalam melakukan pendidikan politik hal ini erat kaitannya dengan anggaran yang berbanding terbalik dengan aspirasi di tingkat bawah hingga pusat. Parpol adalah yang melahirkan pimpinan namun parpol hanya diberikan anggaran pembinaan politik yang terbatas

4. Partai Politik

1. Evaluasi Verifikasi Faktual termasuk sangat berat tapi Kami bisa melewati dengan lancar
2. Usul agar diadakan kegiatan pendidikan Politik
3. Agar dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan KPU dan Bawaslu bebas dari APH

Tanggapan :

Diding : Tugas pendidikan politik itu tugas Parpol dan Kesbangpol bukan KPU sedangkan tugas KPU itu pendidikan pemilih

5. Closing Statement Teguh Fajar Putra Utama

Semoga kita dapat memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara, mari kita rumuskan bersama terkait apa yang telah tadi kita diskusikan untuk kebaikan bangsa dan negara.

3. INSTRUMEN EVALUASI

1. INSTRUMEN EVALUASI PILKADA TAHUN 2024 UNTUK DIMENSI TAHAPAN PILKADA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV6Id-KCn7vdpbKXN-0Puckd-tpXg8xgz4tir7X_fl7bSw/formResponse

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
1	Apakah KPU Provinsi / KPU Kab/Kota menyusun anggaran pemilihan sesuai kebutuhan?	☐ Ya ☐ Tidak	RAB
2	Apakah dokumen anggaran pemilihan terbit tepat waktu (bulan Januari, awal tahun)?	☐ Ya ☐ Tidak	RAB
3	Apakah tersedia petunjuk teknis penggunaan anggaran pemilihan?	☐ Ya ☐ Tidak	
4	Apakah rencana kerja yang disusun sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan?	☐ Ya ☐ Tidak	
5	Apakah rencana dan anggaran sudah sesuai kebutuhan	☐ Ya ☐ Tidak	
	Jika belum sesuai, pada aspek mana ketidaksesuaiannya?		
6	Hambatan/kendala apa saja yang ditemui dalam penyusunan program dan anggaran?		
7	Berapa kali perubahan/revisi anggaran telah dilakukan?	☐ 1 s.d 3 kali revisi ☐ 4 s.d 6 kali revisi ☐ 7 s.d 10 kali revisi ☐ Lebih dari 10 kali revisi	RAB Hibah terakhir (ke-5)
8	Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan	1 (SATU)	Calon Perseorangan
9	Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi administrasi	2 (DUA)	Verifikasi Administrasi
10	Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan verifikasi faktual	TIDAK ADA	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
11	Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Perseorangan	1 (SATU)	Calon Perseorangan
12	Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik	2 (DUA)	Pendaftaran
13	Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	2 (DUA)	Verifikasi Administrasi
14	Berapa jumlah Pasangan Calon yang dilakukan Penelitian administratif perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	2 (DUA)	Verifikasi Administrasi Perbaikan
15	Berapa jumlah Dokumen pasangan calon yang bermasalah dalam penelitian administratif dan penelitian administratif perbaikan yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	31 (TIGA PULUH SATU) DOKUMEN BELUM BENAR PADA TAHAP PENELITIAN ADMINISTRASI AWAL DAN TELAH DIPERBAIKI PADA TAHAP PERBAIKAN	Verifikasi Administrasi Verifikasi Administrasi Perbaikan
16	Berapa Jumlah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Jalur Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan Jalur Perseorangan	2 (DUA)	Penetapan Pasangan Calon
17	Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pencalonan Pilkada?	TIDAK ADA	
18	Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pencalonan?	TIDAK ADA	
19	Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan Pilkada?	TIDAK ADA	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
20	Apakah bentuk fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Iklan Kampanye yang diberlakukan sesuai ketentuan ?	YA	Fasilitasi APK
21	Apakah pasangan calon memanfaatkan APK yang dibuat oleh KPU?	YA	Fasilitasi APK
	Jika TIDAK, sebutkan alasannya		
22	Apakah dalam pelaksanaan kampanye, Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?	YA	
	Jika TIDAK, sebutkan alasannya		
23	Berapa kali dilaksanakan Debat Publik untuk Pasangan Calon	2 (DUA)	1. Debat 1 2. Debat 2
24	Apakah batas waktu rilis SK pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan masa kampanye dengan metode Rapat umum sudah cukup untuk mempermudah koordinasi dengan Polri?	TIDAK	
	Jika TIDAK CUKUP, sebutkan alasannya!		
25	Apakah dalam pelaksanaan kampanye mayoritas Pasangan Calon sudah mematuhi peraturan untuk memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye melalui Surat Pemberitahuan Kampanye kepada kepolisian?	YA	
	Jika TIDAK, sebutkan alasannya		
26	Apakah Peserta Pilkada membersihkan Alat Peraga Kampanye yang telah dipasang sebelumnya?	YA	
	Jika TIDAK, sebutkan alasannya		
27	Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LADK tepat waktu? Jika ADA, sebutkan!	TIDAK ADA	KPU KAB-MAJALENGKA
28	Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPPDK tepat waktu? Jika ADA, sebutkan!	TIDAK ADA	KPU KAB-MAJALENGKA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
29	Berapa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang TIDAK menyampaikan LPSPDK tepat waktu? Jika ADA, sebutkan!	TIDAK ADA	KPU KAB-MAJALENGKA
30	Apakah ada sumbangan dana kampanye yang tidak melalui RKDK? Jika ADA, sebutkan total jumlahnya!	ADA, Rp. 1.458.000	Laporan asuransi Independent Paslon 2
31	Apakah ada Pasangan Calon yang belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)? Jika ADA, sebutkan jumlahnya!	TIDAK ADA	https://sikadeka-pilkada.kpu.go.id /
32	Apa kendala yang menyebabkan Pasangan Calon belum melakukan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?	TIDAK ADA	https://sikadeka-pilkada.kpu.go.id /
32	Apakah ada penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik? Jika ADA, berapa jumlah penerimaan dana kampanye dalam bentuk uang elektronik?	TIDAK ADA	https://sikadeka-pilkada.kpu.go.id /
33	Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan kampanye Pilkada?	TIDAK ADA	
34	Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan kampanye?	TIDAK ADA	
35	Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pencalonan kampanye?	TIDAK ADA	
36	Berapa jumlah TPS yang TIDAK melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan?	TIDAK ADA	
	Jika ADA, apa penyebabnya?		
37	Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?	TIDAK ADA	
38	Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara?	TIDAK ADA	
39	Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada?	TIDAK ADA	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
40	Berapa jumlah Kecamatan yang TIDAK melaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan?	TIDAK ADA	
	Jika ADA, apa penyebabnya?		
41	Berapa jumlah Kabupaten/Kota yang TIDAK melaksanakan tahapan Rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam rentang waktu jadwal yang telah ditentukan pada Pilgub?	TIDAK ADA	
42	Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada?	TIDAK ADA	
43	Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan rekampitulasi suara?	TIDAK ADA	
44	Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan rekampitulasi suara Pilkada?	TIDAK ADA	
45	Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan/atau PUUS sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?	TIDAK ADA	
46	Berapa jumlah TPS yang harus melaksanakan PSU dan PUUS sebagai tindak lanjut Putusan MK?	TIDAK ADA	
47	Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapitulasi suara ulang sebagai tindak lanjut rekomendasi Panwaslu/Bawaslu?	TIDAK ADA	
48	Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan penyandingan suara sebagai tindak lanjut Putusan MK?	TIDAK ADA	
49	Berapa jumlah kecamatan yang harus melaksanakan rekapituasi suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan MK?	TIDAK ADA	
50	Apakah Tahapan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan?	IYA	
51	Berapa jumlah pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota/PPK dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?	TIDAK ADA	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
52	Berapa jumlah Pelanggaran pidana yang dilakukan KPU Prov/Kab/Kota dalam tahapan penetapan hasil?	TIDAK ADA	
53	Berapa jumlah sengketa TUN Pemilihan dalam tahapan penetapan hasil Pilkada?	TIDAK ADA	
54	Ada berapa perkara hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan 2024 yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	TIDAK ADA	
55	Pada lembaga mana saja perkara hukum yang teregister yang dihadapi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota?	TIDAK ADA	
56	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	TIDAK ADA	
57	Ada berapa Perkara Perselisian Hasil Pemilihan 2024 di MK yang dihadapi?	TIDAK ADA	
58	Berapa % dari total perkara tersebut (MK) yang putusannya dimenangkan?	TIDAK ADA	
59	Berapa jumlah Putusan yang harus ditindaklanjuti?	TIDAK ADA	
60	Bagaimana tindak lanjut hasil putusan perkara hukum dimaksud?	TIDAK ADA	
61	Apakah ada kendala dalam menindaklanjuti hasil putusan dimaksud?	TIDAK ADA	
62	Apakah ada Pihak Penyelenggara Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (KPU Prov/Kab/Kota dan Badan Adhoc)	TIDAK ADA	
	Jika ADA, berapa jumlahnya?		
63	Apakah sudah tersedia petunjuk teknis sebagai acuan KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian Sengketa hukum?	YA	Keputusan KPU Nomor 1871 Tahun 2024
64	Apakah dengan ketersediaan petunjuk teknis tersebut mempermudah KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam Penyelesaian perkara hukum?	YA	
65	Apakah dengan tersedianya petunjuk teknis tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dapat menghadapi seluruh proses penyelesaian perkara hukum sampai dengan putusan?	YA	
66	Berapa Jumlah Badan Adhoc yang menyampaikan laporan periodik bulanan?	26 Kecamatan dan 343 Kelurahan/Desa	https://drive.google.com/drive/fold

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
			ers/1PDOWE1HR09d9T56P4y3bRe2BtNA22dzs?usp=drive_link
67	Berapa Jumlah Badan Adhoc yang telah menyampaikan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan?	Tidak Ada	
68	Berapa Jumlah PPK/PPS yang membangun hubungan kerja dengan baik dalam internalnya?	350 orang	
69	Berapa Jumlah PPK/PPS yang mendapatkan laporan dan aduan masyarakat terhadap kinerja dalam melaksanakan tahapan?	Tidak ada	
70	Berapa Jumlah PPK/PPS yang diputus bersalah atas dugaan pelanggaran pilkada?	Tidak ada	
71	Berapa persen kesesuaian data bahan cokit ke hasil cokit yang dilaksanakan Pantarlih?	○ 0 – 20% ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	BA DPS
72	Apakah jadwal tahapan pada proses penyusunan daftar pemilih sudah cukup?	○ Ya ○ Tidak	
73	Berapa persen atau berapa jumlah akses masyarakat ke link cekdptonline?	○ 0 – 20% ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	Pengajuan perubahan lewat cekdptonline
74	Berapa persen atau berapa jumlah masyarakat yang mengajukan dan dilayani pindah memilih?	○ 0 – 20% ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	BA DPTb
75	Faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan penetapan DPT?	Saran dan masukan dari masyarakat	Saran Perbaikan Bawaslu
76	Berapa persen kesesuaian antara jumlah Pantarlih dengan jumlah TPS yang terbentuk?	○ 0 – 20% ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80%	Jumlah Pantarlih

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
		○ 81 – 100%	
77	Berapa persen Pantarlih yang menggunakan ecoklit?	○ 0 – 20% ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	Rekap akun pantarlih
78	Apakah PKPU 7/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sudah sesuai?	Sesuai	
79	Apa evaluasi perbaikan PKPU untuk Pilkada selanjutnya?		
80	Apakah SK KPU 799/2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi perbaikan Pedoman Teknis untuk Pilkada selanjutnya?	Sesuai	
81	Apakah penggunaan ecoklit sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan ecoklit?	Perbesar server ecoklit supaya tidak lama loading Ketika banyak yang mengakses.	
82	Apakah penggunaan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sidalih?	Perbesar server sidalih supaya tidak lama loading Ketika banyak yang mengakses.	
83	Apakah Bimtek Ecoklit dan Sidalih sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?	Sesuai	
84	Apakah penggunaan Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk pengembangan Sirekap Pilkada?	Perbesar server sirekap supaya tidak lama loading Ketika banyak yang mengakses.	
85	Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat TPS pada Sirekap Pilkada	○ 0 – 20% ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	
	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh data hasil tingkat TPS menggunakan SIREKAP	2 Hari	
	Seberapa akurat hasil pembacaan SIREKAP?	40%	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
	Berapa banyak TPS yang tidak berhasil mengakses SIREKAP?	Tidak ada	
86	Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat PPK pada Sirekap Pilkada	○ 0 – 20% ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	BA Hasil penghitungan dan pemungutan suara BA Hasil penghitungan dan pemungutan suaradari sirekap
	Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten/Kota pada Sirekap Pilkada	○ 0 – 20% ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% 81 – 100%	
87	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh data hasil tingkat Kabupaten/Kota menggunakan SIREKAP	○ 1 Hari	 BA Hasil penghitungan dan pemungutan suaradari sirekap
	Berapa Persen Jumlah Data Hasil Rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada Sirekap Pilkada	○ 0 – 20% ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% 81 – 100%	
88	Berapa persen kesesuaian data bahan cokit ke hasil cokit yang dilaksanakan Pantarlih?	○ 0 – 20% ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	BA DPS
	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh data hasil tingkat Provinsi menggunakan SIREKAP	1 Hari	
89	Apakah Bimtek Sirekap Pilkada sudah sesuai? apa evaluasi untuk perbaikan Bimtek?	Sesuai	

2. INSTRUMEN EVALUASI PILKADA TAHUN 2024 UNTUK DIMENSI NON TAHAPAN PILKADA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5YhomrxUx_8vB08WXIeH0dHqwApPGUPiHYC13YB8UOp_XyQ/formResponse

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
1	Apakah tersedia petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama (penyusunan MOU dan PKS)?	ADA	Keputusan KPU Nomor 1068 Tahun 2023
2	Apakah petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut dapat dipahami? Jika TIDAK, bagian mana yang sulit dipahami?	YA	
3	Apakah terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis penyusunan dokumen kerjasama tersebut? Jika ADA, bagian apa yang belum diatur?	TIDAK ADA	
4	Apakah ruang lingkup kerja sama sudah terlaksana dengan baik?	YA	
5	Apa tindaklanjut kerja sama yang dilaksanakan KPU/KIP Provinsi/ dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan stakeholders sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditetapkan?	YA	
6	Apakah telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala?	TIDAK	Belum dilaksanakan evaluasi
7	Apa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama yang telah disusun?		
8	Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?	2	
9	Berapa banyak dokumen kerjasama (MOU dan PKS) yang telah disusun dalam mendukung pelaksanaan Pilkada?	YA	
10	Apakah Regulasi Logistik Pilkada yang ada saat ini sudah mencukupi dalam pelaksanaan pengelolaan logistik Pilkada tersebut?	YA	
	Jika TIDAK, bagian mana yang kurang memadai		
11	Adakah dokumen penetapan jumlah kebutuhan Logistik Pilkada pada satker Anda?	ADA	https://drive.google.com/drive/folders/

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
			1DpeP6Aq_solv7TsSAaEaZ3Xv7ETyrDOr?hl=ID
12	Apakah jumlah kebutuhan logistik Pilkada yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?	YA	
13	Apakah spesifikasi logistik Pilkada yang disusun sudah sesuai dengan kebutuhan pemungutan suara?	YA	
14	Apakah alokasi anggaran sudah tersedia sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa?	YA	
15	Apakah anggaran HIBAH Pilkada yang tersedia pada DIPA telah mencukupi untuk proses pengelolaan logistik Pilkada ?	YA	
16	Apakah ada pembagian kewenangan dalam menyediakan logistik Pilkada berdasarkan Anggaran DIPA HIBAH Pilkada antara Provinsi dengan Kab/Kota?	ADA	
17	Apakah Satker menempatkan personilnya untuk melakukan pengamanan selama produksi logistik Pilkada khusus surat suara?	YA	
18	Apakah Personil tersebut dibekali pengetahuan terkait pengamanan produksi surat suara?	TIDAK	
19	Adakah dokumen jadwal tahapan pengelolaan Logistik Pilkada ?	ADA	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1os-Bu7K6TfNlz4jknhf8P3WAuzFVUvvt_N8Dlr2a_mY/edit?gid=994097417#gid=994097417
20	Dalam hal penyusunan jadwal pengelolaan Logistik Pilkada, apakah sudah memperhitungkan waktu mitigasi resiko dalam produksi, distribusi dan inventarisasi dan pemeliharaan Logistik Pilkada?	YA	
21	Apakah terdapat dokumen kerjasama dengan segenap pemangku kepentingan terkait keselamatan dan keamanan pendistribusian termasuk pengawalan dari	TIDAK ADA	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
	aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia?		
22	Siapa saja stakholder yang terlibat membantu pelaksanaan keselamatan dan keamanan pendistribusian Logistik Pilkada?	Polres, KODIM, Polsek, Koramil	
23	Apakah tersedia dokumen prosedur dalam pelaksanaan pengamanan pendistribusian Logistik Pilkada?	ADA	
24	Adakah dokumen pemetaan daerah prioritas pendistribusian Logistik Pilkada ?	TIDAK ADA	
25	Variabel apa yang menjadi dasar dalam pemetaan daerah prioritas pendistribusian logistik ?		
26	Adakah dokumen pemetaan penggunaan moda transportasi untuk kebutuhan pendistribusian Logistik Pilkada sampai TPS?	TIDAK ADA	
27	Apakah satker sudah melakukan pengecekan keamanan dan kelayakan moda transportasi?	YA	
28	Berapa persen ketersediaan jaringan internet di KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	○ 0 – 20 % ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	Photo Server Jaringan Internet
29	Berapa persen ketersediaan jaringan internet di PPK? PPS? KPPS?	○ 0 – 20 % ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	
30	Berapa persen satker yang sudah menggunakan template website yang sudah disediakan Pusdatin di tingkat KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	○ 0 – 20 % ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	
31	Berapa persen pemasangan alat monitoring di satker KPU Provinsi? KPU Kabupaten/Kota?	○ 0 – 20 % ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
34	Berapa persen serangan siber pada tahapan Pilkada?	○ 0 – 20 % ○ 21 – 40% ○ 41 – 60% ○ 61 – 80% ○ 81 – 100%	
35	Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam mitigasi serangan siber?	penggunaan Encryption Tools; Alat untuk mengenkripsi data dan komunikasi agar tetap aman dari ancaman yang mungkin mencuri informasi sensitif.	 https://drive.google.com/drive/folders/1QCJLah2KAEvY4bmw4Kvvngr-7kiWeb9c
36	Apa saja yang sudah dilaksanakan dalam menangani serangan siber?	Pemasangan Firewall dan Antivirus dan Anti-Malware	 https://drive.google.com/drive/folders/1QCJLah2KAEvY4bmw4Kvvngr-7kiWeb9c
37	Jenis alat dan teknologi apa saja yang sudah digunakan? dan yang belum digunakan?	Microtic dan fortinet	https://drive.google.com/drive/folders/1QCJLah2KAEvY4bmw4Kvvngr-7kiWeb9c

3. INSTRUMEN EVALUASI PILKADA TAHUN 2024 UNTUK DIMENSI KELEMBAGAAN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvKhzyIjesp-q48J3egzmk8qPUF3spITs0pV6QQxQjf_M0TA/formResponse

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
1	Apakah telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Prov/Kab/Kota melalui aplikasi?	☐ Ya ☐ Tidak	Monev
2	Apakah penyusunan dokumen laporan telah dilakukan pada setiap kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan tahapan?	☐ Ya ☐ Tidak	Monev
3	Apakah pedoman/petunjuk teknis sosialisasi pendidikan pemilih pada masa Tahapan Pillkada 2024 mudah dipahami?	☐ Ya ☐ Tidak	https://drive.google.com/file/d/1wAQ_S8nBXenxIhk32X-RzfpccCSV82Rq/view?usp=sharing
	Jika TIDAK, bagian mana yang kurang jelas?		
4	Apakah satker membuat kerangka acuan kerja program kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pada masa tahapan Pilkada 2024?	☐ Ya ☐ Tidak	https://drive.google.com/drive/folders/1uyINkZINBcTa2xYFiwGudgqkBYtcAg8?usp=drive_link
5	Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan?	☐ Ya ☐ Tidak	Rapat Pleno
6	Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi tidak berhasil dilaksanakan?	☐ Ya ☐ Tidak	semua sesuai yang direncanakan
7	Apakah terdapat kegiatan sosialisasi yang sudah direncanakan tapi pada pelaksanaanya tidak memenuhi target yang ditetapkan?	☐ Ya ☐ Tidak	semua dilaksanakan dan memenuhi target
	Apa penyebab kegagalan sosialisasi?	Tidak Ada	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
8	Apa dasar yang anda pergunakan dalam menentukan target sasaran pendidikan pemilih?	☐ Data BPS ☐ Data Pemilih ☐ Arahan Pimpinan	Berita Acara Rapat Pleno
9	Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih pemula?	☐ Ya ☐ Tidak	https://drive.google.com/drive/folders/14tne4UKMF9vKX9hHqe7u9kJkcwMBzEK1?usp=sharing
10	Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih perempuan?	☐ Ya ☐ Tidak	
11	Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan segmentasi pemilih disabilitas?	☐ Ya ☐ Tidak	 https://drive.google.com/drive/folders/1IliuD9nww3utbcyVzLx7KqcLbVhRX_HF.....
12	Apakah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan dengan sasaran masyarakat umum?	☐ Ya ☐ Tidak	https://drive.google.com/drive/folders/1IliuD9nww3utbcyVzLx7KqcLbVhRX_HF.....
13	Apa dasar pertimbangan yang anda pergunakan dalam menentukan jumlah target audien kegiatan pendidikan pemilih?	☐ Ketersediaan dana yang telah dianggarkan ☐ Kebutuhan	Koordinasi kepada PPK untuk pelaksanaan kegiatan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
		faktual di lapangan o o Kebutuhan faktual di lapangan (meskipun ada keterbatasan anggaran) dengan berkolaborasi (co-funding) dengan pihak eksternal	pendidikan Pemilih
14	Berapa jumlah peserta yang terlibat pelaksanaan pendidikan pemilih?	350	https://drive.google.com/drive/folders/1IliuD9nWu3utbcyVzLx7KqcLbVhRX_HF
15	Apa saja kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota pada masa Pilkada 2024	- Car Free Day - KPU go to School - KPU go To Campus - Temu Warga	. https://drive.google.com/drive/folders/1IliuD9nWu3utbcyVzLx7KqcLbVhRX_HF?usp=sharing
16	Berapa tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024?	76,4 %	https://drive.google.com/drive/

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
			folders/1IliuD9nwu3utbcyVzLx7KqcLbVhRX_HF?usp=sharing
17	Apakah satker menggunakan instrumen untuk menilai tingkat pengetahuan peserta pada saat kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih?	☐ ☐ Ya ☐ ☐ Tidak	https://siparmas.kpu.go.id/ipp/satker
18	Apakah satker mengukur tingkat kesadaran pemilih setelah mengikuti kegiatan?	☐ ☐ Ya ☐ ☐ Tidak	https://siparmas.kpu.go.id/ipp/satker
19	Apa keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih?	Tercapainya kegiatan sosialisasi sesuai dengan yang direncanakan	WEBSITE dan MEDSOS
20	Apa saja faktor penghambat (atau penyebab kegagalan) kegiatan sosialisasi?	Ketersedian Anggaran	
21	Apakah satker melibatkan badan adhoc dalam melaksanakan kegiatan?	☐ ☐ Ya ☐ ☐ Tidak	
22	Apakah satker melibatkan pihak terkait (instansi/lembaga/kelompok masyarakat) dalam pelaksanaan kegiatan?	☐ ☐ Ya ☐ ☐ Tidak	
23	Apakah kegiatan sosialisasi & penyebaran Informasi Pilkada (melalui medsos dan website KPU Provi/kab/kota) masuk ke dalam dokumen perencanaan KPU?	☐ ☐ Ya ☐ ☐ Tidak	
24	Apakah dokumen perencanaan KPU Prov/Kota/Kab mempertimbangkan kebutuhan pengadaan personel (<i>social media officer</i>)?	☐ ☐ Ya ☐ ☐ Tidak	
25	Apakah KPU Prov/Kab/Kota merespon dan menyikapi pemaksimalan medsos sebagai cara handal untuk diseminasi informasi pilkada?	☐ ☐ Ya ☐ ☐ Tidak	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
26	Apakah KPU Prov/Kab/Kota sudah memiliki SOP manajemen krisis thd pemberitaan di media yaang berimplikasi kpd respon masyarakat thd lembaga penyelenggara pilkada?	☐ Ya ☐ Tidak	
27	Apa jenis dukungan yang diberikan? (videotron, digital info di jalan tol, radio, dll)	Digital Info, radio	
28	Berapa banyak lembaga /pemangku kepentingan yang terlibat dan apa saja	- Kepolisian - Kodim - Satpol PP - Kejaksaan - Kesbangpol - Kementrian Agama - Dinas kesehatan - Dishub - Diskominfo - Disdik -	
29	Seberapa besar ruang lingkup daerah dukungan/ di mana aja	☐ 0 – 20% ☐ 21 – 40% ☐ 41 – 60% ☐ 61 – 80% ☐ 81 – 100%	
30	Seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat?	Sangat bermanfaat	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
31	Apakah penyaluran anggaran untuk badan adhoc sudah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan	☐ Ya ☐ Tidak	
32	Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc	☐ Ya ☐ Tidak	
33	Apakah anggaran yang disalurkan kepada badan adhoc sudah sesuai dengan kebutuhan kegiatan di badan adhoc	☐ Ya ☐ Tidak	
34	Berapa jumlah badan adhoc yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu?		
35	Apakah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc sudah sesuai dengan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan?	☐ Ya ☐ Tidak	
36	Apakah format laporan pertanggungjawaban keuangan yang telah disusun dapat dengan mudah dipahami oleh badan adhoc?	☐ Ya ☐ Tidak	
37	Sejauhmana pemanfaatan Aplikasi SITAB oleh badan adhoc didalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?		
38	Apakah aplikasi SITAB membantu dan mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pilkada 2024?	☐ Ya ☐ Tidak	
39	Apakah sarana dan prasarana dalam penggunaan aplikasi SITAB di badan adhoc sudah memadai?	☐ Ya ☐ Tidak	
40	Bagaimana tingkat kesesuaian antara akun belanja yang digunakan dengan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan oleh badan adhoc kepada KPU Kabupaten/Kota?		
41	Metode pelaksanaan Bimtek apakah dilakukan secara berjenjang atau dilakukan secara terpusat	☐ Ya ☐ Tidak	
42	Berapa jumlah satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan bimbingan teknis kepada badan adhoc?		
43	Sejauhmana tingkat pemahaman sekretariat badan adhoc didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?		
44	Berapa jumlah satker yang telah selesai melakukan proses pertanggungjawaban anggaran hibah dari register hibah sampai dengan pengesahan?		

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
45	Sejauhmana tingkat pemahaman satker didalam memahami petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan?		
46	Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan: - o Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) - o Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan - o Kecukupan Pengungkapan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) - o Sistem Pengendalian Intren yang memadai		
47	apakah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyusun serta menyampaikan PIPK	☐ Ya ☐ Tidak	
48	Apakah pelaksanaan penatausahaan persediaan Pemilihan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku?	☐ Ya ☐ Tidak	
49	Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor internal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?	☐ Ya ☐ Tidak	
50	Apakah KPU telah memindaklanjuti temuan pemeriksaan auditor eksternal atas pelaporan Persediaan Pemilihan?	☐ Ya ☐ Tidak	
51	Apakah pelaksanaan pemindahtanganan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	☐ Ya ☐ Tidak	
52	Apakah pemindahtanganan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara (PNBP)?	☐ Ya ☐ Tidak	
53	Apakah pelaksanaan pemusnahan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	☐ Ya ☐ Tidak	https://drive.google.com/file/d/1B7npgOWVHupps24iXUtVRqGV4Skog_Nz/view?usp=sharing
54	Apakah pemusnahan Persediaan Pemilihan yang dilaksanakan memberikan kontribusi bagi pengelolaan aset yang efisien?	☐ Ya ☐ Tidak	
55	Apakah pelaksanaan penghapusan persediaan Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?	☐ Ya ☐ Tidak	
56	Apakah pelaksanaan wasdal sudah dilakukan secara efektif untuk menunjang optimalisasi pengelolaan aset?	☐ Ya ☐ Tidak	
57	Apakah upaya pengendalian pengelolaan aset dalam rangka mengurangi resiko audit sudah dilakukan dengan (tertib administrasi) optimal?	☐ Ya ☐ Tidak	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
58	Apakah jumlah SDM pengelola persediaan Pemilihan sudah cukup tersedia?	☐ Ya ☐ Tidak	
59	Apakah sudah ada penetapan PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi di KPU Provinsi/KIP Aceh oleh KPA?	☐ Ya ☐ Tidak	
60	Apakah Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SIRUP?	Ya	SiRUP
61	Apakah masing-masing PPK telah menyusun Referensi Harga dan membuat Draft Kontrak?	YA	
62	Apakah PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi telah memahami tugasnya dalam melaksanakan Verifikasi dan Mini Kompetisi dengan baik?	Tidak	PPK Konsolidasi dan Tim Verifikasi dibentuk di KPU Provinsi
63	Apakah terdapat kendala dalam proses pengumuman Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SIRUP?	YA	
64	Apakah satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki Admin RUP?	Tidak	Pengisian RUP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
65	Apakah Satuan kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sudah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan?	YA	SiRUP
66	Apakah ada kendala dalam pembuatan dan proses penandatangan Surat Perjanjian/Kontrak?	YA	Keterlambatan penandatangan dokumen karena Penyedia tidak berada pada satu wilayah yang sama
67	Apakah PPK sudah menyelesaikan Paket Pekerjaan pada Aplikasi Katalog?	Tidak	Paket Pekerjaan baru pada tahap pengiriman dan penerimaan, belum dapat klik selesai karena

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
			Penyedia belum mengunggah BA Pengiriman
68	Apakah PPK melakukan pencatatan Paket Pekerjaan Non Tender dan Non E-Purchasing pada Aplikasi SPSE?	Tidak	Belum dilaksanakan karena terdapat pekerjaan yang belum ada paket RUP nya
69	Apakah APIP melakukan reuiu atas efisiensi/efektivitas secara periodik?	☐ Ya ☐ Tidak	
70	Apakah Anda setuju bahwa APIP telah memiliki pengetahuan tentang manajemen risiko?	☐ Setuju ☐ Tidak Setuju	
71	Apakah APIP melakukan pengujian keuangan secara periodik?	☐ Ya ☐ Tidak	
72	Apakah APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik?	☐ Ya ☐ Tidak	
73	Apakah APIP melakukan reuiu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya?	☐ Ya ☐ Tidak	
74	Apakah seluruh pegawai di Satker telah diwajibkan menandatangani Pakta Integritas	☐ Ya ☐ Tidak	
75	Apakah pimpinan Satker telah memiliki kepemimpinan yang kondusif?	☐ Ya ☐ Tidak	
76	Apakah rumusan tujuan pengelolaan kegiatan di Satker telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?	☐ Ya ☐ Tidak	
77	Apakah rumusan tujuan kegiatan Satker saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak saling bertentangan?	☐ Ya ☐ Tidak	
78	Apakah Satker telah melakukan identifikasi risiko dengan metode yang dimilikinya?	☐ Ya ☐ Tidak	
79	Apakah Satker telah memiliki mekanisme analisis risiko?	☐ Ya ☐ Tidak	
80	Apakah Satker telah memiliki strategi pembinaan SDM yang utuh baik dalam bentuk Rencana Strategis atau rencana tahunan perencanaan SDM terkait dengan pengembangan kapasitas SDM bidang kepemiluan dan kesekretariatan?	☐ Ya ☐ Tidak	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
81	Apakah Satker telah memiliki sistem pengendalian atas pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN yang meliputi pengendalian umum (pengamanan, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan) dan pengendalian aplikasi (otorisasi, kelengkapan, akurasi, keandalan pemrosesan)	☐ Ya ☐ Tidak	
82	Apakah Satker telah memanfaatkan sarana komunikasi (arahan lisan, memo/surat/nota dinas, email, buku pedoman, papan pengumuman, rekaman video, internet dan intranet) yang ada secara optimal?	Ya	
83	Apakah Satker telah mengelola, mengembangkan dan memperbaharui SIM secara terus menerus	☐ Ya ☐ Tidak	
84	Apakah pimpinan Satker telah melakukan pemantauan terhadap SPI secara berkelanjutan melalui kegiatan pengelolaan, supervisi, pembandingan, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas	☐ Ya ☐ Tidak	
85	Apakah pengelolaan kegiatan dan keuangan Satker telah dievaluasi secara terpisah oleh Pimpinan Satker, dan atau Inspektorat dan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi?	☐ Ya ☐ Tidak	
86	Apakah Satker telah melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi?	☐ Ya ☐ Tidak	
87	Apakah kebutuhan PPK dan pejabat pengadaan yang bersertifikat PBJ sudah terpenuhi untuk satker KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di masing - masing wilayah?	☐ Ya ☐ Tidak	
88	Berapa jumlah ASN yang telah lulus dan memiliki sertifikat PBJ?	5	
89	Apakah untuk memenuhi ASN bersertifikat PBJ, akan mengirimkan peserta Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Model MOOC?	☐ Ya ☐ Tidak	
90	Jumlah PPK dan PPS yang menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?		
91	Apakah ada PPK dan PPS yang tidak menggunakan Modul KPPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
92	Jumlah KPU Kab/Kota yang menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?		

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
93	Apakah ada KPU Kab/Kota yang tidak menggunakan Modul PPK dan PPS yang ditetapkan oleh KPU dalam pelaksanaan bimtek?	☐ Ada ☐ Tidak Ada	
94	Apakah fasilitator dalam menyampaikan materi sudah sesuai dengan modul?	☐ Ya ☐ Tidak	
95	Apakah isi materi sudah sesuai dengan isu - isu strategis terkait pemilihan?	☐ Ya ☐ Tidak	
96	Apakah Jam Pelajar yang ditetapkan sudah mencukupi?	☐ Ya ☐ Tidak	

4. INSTRUMEN EVALUASI PILKADA TAHUN 2024 UNTUK DIMENSI EKSTERNALITAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeW2h-_pvz9MesI2-hePDzia7kiwlB076R0ULxRyxwXynadQ/formResponse

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
1	Apakah sebelum diproduksi massal dilakukan validasi contoh cetak produk Logistik Pilkada oleh PPK?	YA	Berita Acara Persetujuan Pencetakan Surat Suara
2	Apakah dilakukan pengawasan produksi di pabrik?	YA	
3	Apakah dalam pengawasan produksi di pabrik melibatkan tim pakar?	TIDAK	
4	Adakah dokumen standarisasi kualitas surat suara untuk mengkategorikan baik, rusak atau cacat?	ADA	
5	Adakah sistem informasi untuk melakukan monitoring proses pengiriman logistik dari penyedia ke gudang KPU Kabupaten/Kota ?	ADA	https://silog.kpu.go.id
6	Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari penyedia ke Kabupaten/kota?	YA	
7	Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pengiriman logistik dari Penyedia ke Tempat Penyimpanan/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota?	YA	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	Link Dokumen Pendukung
8	Apakah ada mitigasi dalam hal terjadi hambatan atau gangguan Pendistribusian logistik dari Tempat Penyimpanan Logistik/Gudang logistik Pilkada KPU Kabupaten/Kota ke TPS?	YA	
9	Apakah jumlah logistik yang diterima telah sesuai dengan kebutuhan?	YA	Bukti Tanda Terima Logistik
10	Adakah dokumen kriteria standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada yang memadai ?	ADA	
11	Apakah Satker dapat memenuhi standar tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada sesuai dengan kriteria yang ditetapkan?	YA	
12	Adakah peran Pemerintah Daerah untuk mendukung penyediaan tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?	TIDAK ADA	
13	Apakah dilakukan sortir dan hitung terhadap logistik Pilkada setelah diterima dari pabrik?	YA	
14	Apakah terdapat standar pemeliharaan terhadap logistik Pilkada untuk menjaga kualitas Logistik Pilkada selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang Logistik Pilkada?	TIDAK	
15	Adakah Berita Acara Pemusnahan Surat Suara dan melakukan pendokumentasian kegiatan pemusnahan surat suara tersebut?	ADA	https://drive.google.com/file/d/1B7npgOWVHupps24iXUtVRqGV4Skog_Nz/view?usp=sharing
16	Apakah Satker turut melibatkan instansi luar seperti Bawaslu atau Kepolisian dalam pemusnahan kelebihan surat suara?	YA	